

KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DPR-RI MINGGU KETIGA JULI 2011

Pada 9 Mei 2011 DPR memulai Masa Persidangan IV tahun 2010-2011 setelah melewati Masa Reses III tahun 2010-2011. Masa sidang IV ini akan berakhir pada 22 Juli 2011. Konsentrasi kegiatan Dewan pada masa sidang ini tetap pada pelaksanaan di bidang legislasi, pengawasan dan anggaran. Berikut ringkasan kegiatan Alat Kelengkapan Dewan minggu ketiga Juli 2011.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H Marzuki Alie

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Pada minggu ini, kegiatan pelaksanaan fungsi anggaran difokuskan kepada 2 RUU yaitu: RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2010 dan RUU tentang Perubahan Atas APBN Tahun Anggaran 2011.

[1] RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2010, Menkeu telah memberikan jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR-RI atas RUU ini yang telah disampaikan dalam Rapur tanggal 7 Juli 2011. Dalam menanggapi pandangan fraksi-fraksi, Pemerintah telah menyampaikan alasan-alasan penjelasan umum dan penjelasan khusus yang berkaitan dengan pandangan fraksi-fraksi atas beberapa materi diantaranya: arah pembangunan dan kebijakan fiskal dan perhatian khusus pada sektor pangan; kontribusi APBN dan pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan kemakmuran, serta tingkat pengangguran dan kemiskinan; tingginya laju inflasi tahun 2011 yang melebihi asumsi APBNP tahun 2010; realisasi lifting minyak tahun 2010 yang lebih rendah dari asumsi APBNP tahun 2010; optimalisasi penelaahan dan verifikasi terhadap RKA-KL; program reformasi di bidang perpajakan, mencakup ekstensifikasi, intensifikasi dan program kegiatan paska-kegiatan sunset policy; perlunya pembangunan infrastruktur untuk rakyat dengan prioritas belanja modal yang efisien dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi; dana transfer ke daerah dan penyerapan anggaran yang rendah, administrasi DIPA yang sangat rumit, yang menjadi kendala penyerapan.

[2] Mekanisme Pembahasan dan latar belakang RUU tentang Perubahan Atas APBN Tahun Anggaran 2011. **Pertama**, sesuai dengan Pasal 27 UU 17/2003 tentang Keua-



ngan Negara, Pasal 161 UU 27/2009 tentang MD3, UU 10/2010 tentang APBN 2011, Pasal 157 Tatib DPR RI, serta Siklus pembahasan APBN Perubahan 2011, Pemerintah telah menyampaikan RUU Perubahan dalam Rapat Paripurna DPR RI, pemerintah juga menyampaikan Pokok-Pokok APBN Perubahan 2011 dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran pada tanggal 5 Juli 2011.

Kedua, Dalam pembahasan APBN Perubahan 2011, DPD menyampaikan pengawasan atas pelaksanaan APBN kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti, sesuai dengan Pasal 224, huruf f Ayat (1) UU 27/2009 tentang MD3. **Ketiga**, Badan

Anggaran membentuk Panja APBN Perubahan 2011, yaitu: [1] Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan (Selasa, Rabu, 12-13 Juli 2011), [2] Panja Belanja Pemerintah Pusat. (Kamis, Jum'at, 14-15 Juli 2011), [3] Panja Transfer ke Daerah (Kamis, Jum'at, 14-15 Juli 2011).

Setelah Panja-panja melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah, komisi-komisi melakukan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra Kerjanya untuk menyempurnakan Perubahan RKA K/L sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran, dan selanjutnya dilaporkan kembali kepada Badan Anggaran dan Kementerian Keuangan, hal ini sesuai dengan Pasal 157 Tatib DPR RI.

Latar belakang Perlunya Perubahan Terhadap APBN Tahun 2011 adalah [1] **Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2011**. Sejak ditetapkan dengan UU 10/2010 tentang APBN 2011, terhadap berbagai perkembangan pada perekonomian domestik dan eksternal yang menyebabkan perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN 2011, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian, sesuai dengan tabel berikut :

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM**: Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH**: Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH**: Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA**: Helmizar **PIMPINAN REDAKSI**: Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI**: Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI**: Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto,S.Sos; Iwan Armanias; Suciati,S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; **PENANGGUNG JAWAB FOTO**: Rizka Arinindya **SIRKULASI**: Supriyanto **Diterbitkan Oleh**: Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

No.	Indikator Eko Makro	APBN 2011	APBN Perubahan 2011	% Perubahan
1.	Pertumbuhan Ekonomi %	6.4	6.5	1%
2.	Inflasi %	5.3	6.0	13%
3.	Nilai Tukar (Rp/US\$)	9.250	8.800	-5%
4.	Tingkat Suku bunga SPN 3 Bln %	6.5	5.6	-14%
5.	Harga Minyak (US\$/barel)	80.0	95.0	19%
6.	Lifting Minyak (ribu barel/hari)	970	945	-3%

[2] **Perubahan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal**, terdiri dari: perubahan Parameter dan besaran subsidi energi; tambahan Anggaran Belanja mendesak dan Prioritas sesuai Direktif Presiden; pelebaran defisit Anggaran dari 1,8% PDB menjadi 2,1% dari PDB. [3] **Pergeseran Anggaran Antar Kegiatan dan Antar Jenis Belanja**: pergeseran Anggaran dari Bagian Anggaran (BA) 999 menjadi BA KL; pergeseran Anggaran Antar Kegiatan, dan Antar Jenis dari antara lain Belanja Barang ke Belanja Modal dan atau Bantuan Sosial dari Penghematan Anggaran sesuai Inpres No.7 Tahun 2011. [4] **Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun-tahun sebelumnya untuk Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan**: untuk menutup kebutuhan pembiayaan akibat pelebaran deficit dan tambahan belanja prioritas, diperlukan tambahan penggunaan SAL dari tahun-tahun sebelumnya.

Komisi-Komisi DPR dalam minggu ini telah melakukan Raker/RDP dengan pasangan kerja masing-masing, membahas tentang perubahan APBN tahun anggaran 2011 dari masing-masing kementerian. Dalam RDP tersebut, pada umumnya, Komisi-Komisi Dewan meminta untuk dilakukan penajaman terhadap rincian program dan kegiatan yang berkaitan dengan usulan perubahan APBN kementerian bersangkutan untuk tahun anggaran 2011 dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas, perimbangan anggaran bagi kantor-kantor wilayah seluruh Indonesia, dan satuan kerja lainnya.

Komisi Dewan juga meminta, masing-masing kementerian untuk meningkatkan penyerapan anggaran dengan perencanaan dan penyebaran pelaksanaan program prioritas, serta meningkatkan fungsi koordinasi.

Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Dalam Rapat Bamus 14 Juli, Komisi, Pansus yang menangani RUU melaporkan kepada Rapat Bamus tentang hasil pembicaraan tingkat I atas RUU yang telah ditangani dan meminta untuk dijadwalkan pada pembicaraan tingkat II (pengambilan keputusan). Beberapa RUU tersebut adalah sebagai berikut: Komisi VI, RUU tentang Perubahan Atas UU No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, RUU tentang Perubahan Atas UU No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Pansus: RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Komisi VIII: RUU tentang Penanganan Fakir Miskin. Adapun Komisi V melaporkan tentang perkembangan pembahasan RUU ten-

tang Rumah Susun. Komisi III melaporkan perkembangan pembahasan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Selama Masa Persidangan IV ini, Panja Mafia Pemilu DPR-RI, melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka klarifikasi surat penetapan calon terpilih anggota DPR-RI tahun 2009. Para pihak telah diminta datang untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi, diantaranya Dr. Arsyad Sanusi mantan anggota MK, Andi Nurpati mantan anggota KPU, dan para staf/pegawai, baik di lingkungan MK maupun KPU. Terakhir, juga dilakukan pertemuan dengan pejabat KPU dan Bawaslu. Panja Mafia Pemilu dibentuk karena Komisi II menilai kinerja KPU dan jajarannya, baik secara teknis, administrasi dan substantif, banyak kelemahan, sehingga menimbulkan masalah dalam penetapan calon terpilih anggota DPR tahun 2009. Oleh karenanya, Komisi II meminta agar KPU memperbaiki dan mentaati mekanisme kerja yang berlaku dan segera menindaklanjuti penyelesaian persoalan-persoalan yang terjadi di masa yang akan datang.

Dari serangkaian kegiatan Panja, masukan dari berbagai pihak yang terkait dengan Mafia Pemilu, akan dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi Komisi II dalam mengambil langkah-langkah kebijakan (membuat rekomendasi) tentang penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang, khususnya penyempurnaan sistem Pemilu dan UU tentang Penyelenggara Pemilu.

Raker Komisi II dengan Menpan dan Reformasi Birokrasi, telah membahas mengenai lembaga-lembaga non-struktural (LNS) yang tidak efektif lagi kinerjanya. Dalam laporan menteri, ada beberapa lembaga yang direkomendasikan untuk dihapus (4 buah lembaga) dan ada lembaga (7 buah lembaga) yang akan dialihkan kepada kementerian atau lembaga bersesuaian. Dalam rapat tersebut, Komisi II mendesak menteri PAN dan RB untuk menyusun desain besar penyelesaian penataan seluruh LNS pada Masa Sidang II tahun sidang 2011-2012. RUU menyangkut penataan LNS diharapkan disiapkan pemerintah pada tahun 2012.

Komisi III telah melakukan RDP dengan Prita Mulyasari, terpidana kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera Tangerang. Dalam catatan Komisi III pada akhir RDP, mengagendakan akan mena-

nyakan kasus pembatalan putusan bebas Prita kepada Jaksa Agung dan MA dalam masa sidang sekarang ini. Komisi III juga akan membahas sinkronisasi antara putusan perdata dan putusan pidana kasus Prita kaitannya dengan adanya kasasi.

Diplomasi Parlemen

Pada awal Juli 2011, Delegasi DPR-RI yang dipimpin Ketua DPR telah berada di Moskow untuk melakukan serangkaian pertemuan dengan Duma Negara Rusia yang dipimpin HE, Mr. Boris Vyacheslavovich Grylov. Dalam kesempatan itu Ketua DPR Marzuki Alie, mengungkapkan perlunya peningkatan hubungan bilateral antara kedua Parlemen. Sementara, Boris Grylov berharap ada peningkatan kerjasama di berbagai bidang, seperti ekonomi, budaya dan sosial. Beberapa pokok persoalan yang menyangkut hubungan kedua negara dibicarakan penuh kekeluargaan. Rusia sangat berharap ada peningkatan kerjasama dengan Indonesia, ekspor/impor harus terus dikembangkan dan ditingkatkan.

Sementara, pada Rabu 12 Juli, Ketua DPR-RI menerima delegasi Parlemen Kyrgistan yang dipimpin HE, Akhmatbek Keldibekov. Kehadiran delegasi adalah untuk memenuhi undangan Ketua DPR-RI Marzuki Alie. Dalam pembicaraan keduanya, sama-sama bersepakat untuk meningkatkan hubungan antarkedua negara dan kedua parlemen. Hubu-

ngan bilateral antara kedua negara dimulai pada Desember 1991. Dan, karena kedua negara belum memiliki perwakilan di masing-masing negara, maka hubungan ini belum efektif dilakukan, walaupun hubungan perdagangan telah dilakukan secara informal. Ketua parlemen Kyrgistan minta bantuan kepada Ketua DPR agar dilakukan pembukaan kantor perwakilan di kedua negara, paling tidak penempatan Konsulat Jenderal RI di Kyrgistan, dukungan atas keanggotaan Kyrgistan di DK PBB sebagai anggota tidak tetap, meminta bantuan bagi seorang warga negara Kyrgistan yang sedang menjalani hukuman di Indonesia, diharapkan sisa hukumannya dapat dijalkan di Kyrgistan. Atas usulan ini, Ketua DPR menjanjikan akan diteruskan kepada Pemerintah, karena ini menjadi kewenangan lembaga eksekutif.

Pada akhir pertemuan, telah ditandatangani Memorandum Saling pengertian (MOU) antara DPR-RI dan Dewan Tertinggi Republik Kyrgistan. Memorandum Saling pengertian (MOU) berisi antara lain pengembangan kerjasama antara komisi-komisi, fraksi, dan kelompok-kelompok di parlemen, saling mengunjungi, guna mempelajari metode-metode dan keahlian dalam penyusunan legislasi, juga mendorong bagi kedua sekretariat jenderal untuk melakukan akses timbal balik ke sumber informasi dan database dari kedua parlemen. MOU ditandatangani oleh Ketua DPR Marzuki Alie dan Dewan Tertinggi Republik Kyrgistan HE, Akhmatbek Keldibekov.



Pertemuan Asia Pasifik Group IPU Sepakati Beberapa Point Penting

Pertemuan Asia-Pacific Group (APG) Inter-Parliamentary Union, yang dibuka Ketua DPR RI Marzuki Alie, Kamis (14/7) telah berhasil menyepakati beberapa point penting.

Seusai membuka acara, pertemuan dilanjutkan oleh Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf yang juga sekaligus sebagai President of the Coordinating Committee of Women Parliamentarians. Salah satu agenda penting yang dibahas pada pertemuan kali ini adalah Rencana Strategis IPU 2012 – 2017.

Asia Pasifik Group IPU mempunyai visi menjadi organisasi di Asia Pasifik yang universal, organisasi yang dinamis dan efektif yang mampu memajukan penegakan hukum, nilai-nilai demokrasi, budaya, dan lembaga melalui kerja sama antarparlemen.

Selain itu, organisasi ini juga mempunyai visi untuk dapat membantu parlemen anggota parlemen di semua bagian dunia dalam merespons secara efektif terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka untuk perdamaian, hak asasi manusia, kesetaraan gender, kemakmuran, dan pembangunan.

Untuk Rencana Strategis IPU 2012-2017, beberapa point telah disepakati diantaranya adalah, membangun Parlemen untuk mendukung tujuan Pembangunan Internasional. Hal ini bertujuan untuk memperkuat tindakan parlemen terhadap perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

Dunia saat ini, sedang menghadapi kelangkaan energi karena keterbatasan sumber energi non-terbarukan sedangkan penggunaan energi tak terbendung dengan meningkatnya populasi dunia. Hal ini menjadi catatan penting, bahwa kondisi tersebut rentan untuk menghasilkan ketegangan di antara negara dan bangsa.

Di sisi lain, keterbatasan sumber energi juga mengancam kondisi kehidupan yang berkelanjutan bagi warga dunia dan adanya modernisasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi



Delegasi Asia Pasifik Group IPU

anggota parlemen untuk mempromosikan diversifikasi energi dan penggunaan energi terbarukan dalam rangka untuk mengamankan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Selain itu, Asia Pasifik Group IPU juga ingin berperan mengatasi bencana alam. Langkah ini diambil bertujuan untuk meningkatkan peran parlemen dalam kebijakan mitigasi dan mengembangkan manajemen yang tanggap terhadap resiko bencana.

Dunia saat ini sering mengalami bencana alam besar. Asia Pasifik Group IPU mengakui dampak signifikan dari bencana alam yang ditimbulkan bagi penduduk diseluruh dunia.

Dalam hal ini, isu manajemen resiko bencana harus ditangani secara serius dalam parlemen, terutama untuk memastikan bahwa ada dukungan yang cukup untuk undang-undang tentang manajemen resiko bencana.

Diharapkan kesepakatan ini akan mendorong negara-negara IPU di bidang legislasi dalam mengatur bencana, termasuk juga mengatur kerjasama internasional dalam manajemen bencana. IPU juga akan berbagi

dan bertukar informasi dengan organisasi internasional yang relevan yang berhubungan dengan manajemen bencana.

Hal yang tak kalah pentingnya dalam pertemuan kali ini adalah kesepakatan kontribusi untuk perdamaian dan pencegahan konflik. Sejalan dengan Piagam PBB, adalah penting untuk mendukung langkah-langkah parlemen untuk mengatasi tindakan internasional yang bertentangan dengan Piagam PBB, termasuk intervensi militer, agresi, dan pendudukan asing.

Kegiatan lainnya yang ditargetkan adalah memfasilitasi rekonsiliasi politik melalui parlemen dalam situasi pasca konflik dan diplomasi parlemen.

Pada kesempatan itu, Nurhayati Ali Assegaf menyampaikan presentasi tentang visinya untuk kepemimpinan masa depan IPU. Para peserta menyambut baik dan mendukung konsep kepemimpinan yang disajikan.

Rekomendasi dari hasil pertemuan di Jakarta ini akan disampaikan pada Pertemuan APG di 125th IPU Assembly di Bern-Swiss, Oktober 2011. (tt) foto: tt

DPR Janji Perjuangkan Perangkat Desa Menjadi PNS

DPR berjanji akan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan perangkat desa melalui pengangkatan mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat menerima sekitar 100 perangkat desa.

“Kita minta agar klausul pengangkatan Perangkat desa menjadi PNS masuk didalam RUU desa nanti,”kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat menerima sekitar 100 perangkat desa, di ruang Nusantara, Selasa, (12/7).

Menurut Taufik, dirinya selaku pimpinan dewan mengharapkan seluruh Fraksi dapat mendukung komitmen tersebut. “Kita berharap seluruh perangkat desa yang tergabung dalam PPDII melakukan demo secara damai tidak liar dijalan karena yang kita khawatirkan takut disusupi oleh oknum yang

tidak bertanggung jawab,” jelasnya.

Dia mengatakan, dirinya menyetujui dilakukan moratorium PNS namun diharapkan dapat segera masuk dan diangkat menjadi PNS. “Intinya saya sepakat banyak DAU daerah habis untuk membayar PNS daerah yang kurang efektif coba bandingkan dengan perangkat desa yang memang berjuang memberikan pelayanan bagi masyarakat desa,” paparnya.

Seluruh komponen bangsa, kata Taufik, diharapkan bersama-sama ikut memperjuangkan perangkat desa agar

dapat masuk dalam klausul RUU desa. “Pemerintah memiliki anggaran 1.7 triliun. Dana tersebut dapat dialihkan untuk mengangkat seluruh PNS yang berasal dari perangkat desa,” lanjutnya.

Menurutnya, jangan bicara menjadi PNS semata tetapi harus menggedepankan kesejahteraan perangkat desa melalui pengangkatan PNS. “Perjuangannya harus jelas yaitu dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pengangkatan perangkat desa menjadi PNS,” tambahnya..

Pada kesempatan tersebut Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan bersama-sama dengan sekitar 100 perangkat desa menyanyikan lagu Mars desaku, saat audiensi di Gedung Nusantara tersebut. Terlihat ratusan peserta bersemangat mengepalkan tangan keatas dan menyanyikan lagu desaku dengan lantang bersama dengan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Selain itu, Taufik Kurniawan menyempatkan membubuhkan tanda tangan bermaterai yang kedua kalinya sebagai bukti dukungan penuh dirinya terhadap perjuangan perangkat desa. Yang isinya berbunyi saya Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berjanji memperjuangkan kesejahteraan perangkat desa melalui pengangkatannya menjadi PNS. (si) foto:as/parle

Perlu Peninjauan Kembali Desentralisasi Pendidikan

Kebijakan Otonomi Daerah yang lahir pada masa reformasi melalui UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan dunia pendidikan tidak makin cerah.

Otonomi Daerah hanya memindahkan permasalahan pendidikan dari pusat ke daerah. Kualitas pendidikan semakin sulit berkembang, karena

pendidikan ikut dijadikan objek politik para elit daerah.

“Faktanya kita masih melihat masih tingginya disparitas pendidikan

antar kelompok masyarakat, baik antara perkotaan dan pedesaan, kaya dan miskin, serta antar daerah,” kata Ketua DPR RI Marzuki Alie saat bicara dalam Seminar Nasional dengan tema ‘Mampukah Otonomi Pendidikan Mendorong Peningkatan Daya Saing Bangsa Pada Era Globalisasi’ di Auditorium



Ketua DPR Marzuki Alie saat bicara dalam Seminar Nasional di Auditorium Gedung Pusat IKIP PGRI Semarang di Semarang

Gedung Pusat IKIP PGRI Semarang di Semarang, Selasa (12/7/2011).

Ia memberi contoh penetapan Kepala Dinas Pendidikan oleh Kepala Daerah yang seringkali tanpa didasarkan pada kapabilitas seseorang, melainkan hanya karena kedekatan secara politik. Akibatnya pendidikan dikelola secara serampangan karena orang yang berada di pucuk pimpinan pendidikan di daerah bukan orang yang memahami tugasnya. Kualitas guru di daerah rata-rata juga kurang baik, karena rekrutmen dilakukan secara tidak profesional. Penerimaan calon guru dengan kolusi sudah dianggap umum dan belum jelas akreditasinya.

Kepada peserta seminar yang terdiri dari mahasiswa, guru dan dosen yang datang dari beberapa wilayah di Jateng, Ketua DPR menyebut masalah krusial yang juga menjadi bagian dari pendidikan adalah masalah sarana dan prasarana pendidikan yang tidak lebih baik. Besarnya dana pendidikan tidak sebanding dengan peningkatan kualitas pendidikan, sementara birokrasi pendidikan semakin ketat dan rumit.

Anggaran Pendidikan 20 persen dari APBN/APBD yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan UU, semula dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidik, hingga kini ternyata belum dapat diimplementasikan secara seimbang. “Keadaan tersebut membuat kita berpikir, apakah tidak lebih baik jika dilakukan sentralisasi pendidikan di tengah kebijakan otonomi daerah sekarang ini atau sekurang-kurangnya sentralisasi terhadap tenaga pengajar atau guru,”

imbuhnya.

Marzuki memaparkan beberapa langkah mendesak yang dapat dilakukan diantaranya, mengevaluasi manajemen pendidikan, dari desentralisasi menuju sentralisasi kembali, untuk menjauhkan pendidikan dari kegiatan politik praktis para elit kekuasaan di daerah. Duduk bersama antara DPR dan Pemerintah untuk membiarkan kebijakan sentralisasi tenaga pendidik.

“Segegap pihak perlu berupaya mencari formula terbaik untuk penyelenggaraan UN yang jujur, peningkatan kesejahteraan pendidik dan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana pendidikan,” tambah politisi Partai Demokrat yang di daerah pemilihannya Sumsel, juga mengelola lembaga pendidikan dari tingkat TK sampai perguruan tinggi.

Rektor IKIP PGRI Semarang, Muhandi, SH. M.Hum mengatakan Seminar Nasional dalam rangka menyongsong Dies Natalis ke 30 ini diharapkan dapat menemukan tawaran solusi bagi permasalahan yang muncul setelah 10 tahun pelaksanaan otonomi daerah termasuk didalamnya otonomi pendidikan.

Anggota Dewan Kehormatan PGRI Ketua Umumorganisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pusat, DR. Sulisty, M.Pd yang bertindak selaku moderator menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPR RI Marzuki Alie untuk hadir dalam acara yang disebutnya seminar para guru di Semarang. Ia juga menyampaikan keyakinannya pemimpin bangsa yang berhasil adalah

yang baik dan dekat dengan para guru. Kepada para peserta seminar ia juga menyampaikan rasa terkejutnya ketika menjemput Ketua DPR di Bandara Ahmad Yani. “Kita sudah menyediakan ruang VIP di bandara, tapi saya terkejut Ketua DPR tidak bersedia kesana dan lebih memilih ruang kedatangan umum, ternyata tidak semua politisi seperti yang kita bayangkan,” jelasnya.

Sulistyo yang juga anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Jawa Tengah pada kesempatan tersebut meminta kesediaan Marzuki Alie untuk menjadi anggota Dewan Kehormatan PGRI, organisasi profesi yang menurutnya memiliki anggota terbanyak dibanding organisasi profesi lain. Ia mengungkapkan dari 2,7 juta tenaga pengajar di seluruh Indonesia 90 persen diantaranya adalah anggota PGRI.

Menjawab hal ini Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan kesediaannya, sekaligus berterima kasih apabila para guru mempercayainya. Ia mengaku ada dua undangan yang sulit baginya untuk menolak, pertama bertemu para pemuda dan kedua memenuhi undangan para guru. “Saya selalu hadir menyangkut acara kepemudaan karena terkait calon pemimpin bangsa. Kemudian saya juga upayakan hadir acara guru, karena guru merupakan pilar bangsa, kalo guru baik InsyaAllah nasib bangsa akan selamat. Saya sangat berkepentingan pada guru karena ingin bangsa ini kedepan menjadi lebih baik,” demikian Marzuki. (iky) foto: iky

Komisi IV DPR Perjuangkan Anggaran Pupuk Bersubsidi Sebesar Satu Juta Ton

Komisi IV DPR sangat mendukung dengan adanya penggunaan anggaran eks pengurangan kuantum pupuk urea bersubsidi sebesar 1 juta ton yang setara dengan satu triliun rupiah.



Ketua komisi IV DPR H.M Romahurmuziy saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian RI

Demikian yang dikatakan Ketua Komisi IV DPR H.M. Romahurmuziy, pernyataan ini disampaikan pada saat Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian Suswono di Gedung DPR Senayan Jakarta Sesen, (11/07) siang.

Ketua Komisi IV DPR Romahurmuziy juga menegaskan, bahwa Komisi IV DPR telah menugaskan Anggota Badan Anggaran Komisi untuk tetap memperjuangkan penggunaan anggaran eks pengurangan kuantum pupuk urea bersubsidi sebesar satu juta ton pada APBN Tahun 2011 yang setara dengan satu triliun rupiah, agar dapat digunakan sesuai dengan keputusan rapat kerja Komisi IV DPR dengan menteri Pertanian tahun lalu.

Ketua Komisi IV DPR Romahurmuziy meminta agar Kementerian Pertanian dalam menyusun kegiatan dan program kerja konsisten dengan rencana strategis yang telah ditetapkan dan dalam RAPBN tahun 2012, Kementerian Pertanian dapat mengakomodir usulan program dan kegiatan dari hasil kunjungan kerja dan kunjungan lapangan, serta usulan dari berbagai daerah yang disampaikan kepada Komisi IV DPR yang sesuai dengan skala prioritas nasional, tegas Romahurmuziy.

Romahurmuziy juga meminta kepada kementerian Pertanian, agar APBN Tahun 2011 tetap memprioritaskan realisasi program-program pro rakyat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani. Selanjutnya

Ketua Komisi IV DPR juga meminta agar dalam pelaksanaan program disertai peningkatan pengawasan baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Sementara itu Menteri Pertanian Suswono mengatakan, serapan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp.4,34 triliun atau 25,98 persen dari pagu anggaran. Realisasi serapan anggaran ini sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 24,5 persen. Diharapkan pada bulan mendatang realisasinya dapat mencapai minimal 40 persen, ungkap Suswono.

Suswono juga menegaskan, Angka realisasi anggaran ini tidak mencerminkan pelaksanaan kegiatan, karena realisasi fisik dilapangan lebih tinggi. Umumnya para pelaksana belum melakukan penagihan, dan penagihan akan dilakukan setelah keseluruhan kegiatan/penyaluran bantuan final selesai.

Menteri Pertanian Suswono mengemukakan, usulan APBN-P 2011 tersebut telah mengakomodir kegiatan-kegiatan yang berasal dari rencana revisi anggaran Gernas Kakao dan MIFEE tahun 2011 yang tidak disetujui kementerian Keuangan. Selain itu juga menampung kegiatan-kegiatan yang semuladiusulkan akan dibiayai dari eks pengurangan subsidi pupuk.

Kegiatan ini antara lain menyiapkan sarana dan prasarana alat pengolahan tepung-tepungan, dryer, rice transplanter, sarana penanganan cabai dan bawang merah, prasarana perkarantina, bantuan langsung pupuk, sarana pemulihan lahan maupun sarana penetralisir tanah, kata Suswono. (.Spy) foto:ry/parle

Komisi V Apresiasi Hasil Laporan Keuangan BMKG

Komisi V DPR juga memberikan apresiasi kepada Badan Pelaksanaan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel BPLS) yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dengan catatan dan selanjutnya meminta untuk mempertahankan dan terus meningkatkan status tersebut pada masa yang akan datang.

Demikian salah satu kesimpulan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR Nusyirwan Sujono saat memimpin rapat dengar pendapat dengan BMKG, Bapel BPLS, Badan SAR Nasional (Basarnas) dan Badan Pelaksanaan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BP-BPWS), Rabu (13/7) di gedung DPR.

Pada kesimpulan tersebut, Komisi V DPR secara khusus mengapresiasi BMKG yang berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 (sembilan) temuan BPK telah ditindaklanjuti.

Rapat dengan Badan-badan yang menjadi mitra kerja Komisi V pagi itu dengan agenda pokok evaluasi laporan keuangan Tahun 2010 di masing-masing Badan tersebut.

Selain mengapresiasi kinerja BMKG, Komisi V juga mendorong Basarnas, Bapel BPLS dan BP-BPWS untuk terus meningkatkan kinerjanya dimana sebagian dari indikator kinerja dan realisasi fisik yang telah ditetapkan masih berada di bawah target capaian.

Namun untuk BMKG, anggota Komisi V dari F-PPP Norhasanah mengingatkan agar BMKG juga tidak cepat puas dengan hasil yang telah dicapai. BMKG, kata Norhasanah, diminta untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang terjadi di Kalimantan yang sering terjadi kabut asap dan asap ini sangat membahayakan tidak saja bagi masyarakat di Kalimantan, tapi asap ini juga mengganggu negara tetangga.

Untuk itu, dia meminta BMKG untuk melakukan antisipasi dan di-programkan jauh-jauh sebelumnya, sehingga saat terjadinya kabut asap, masyarakat tidak dibuat panik karena BMKG telah melakukan langkah anti-

Komisi V DPR RI mengapresiasi atas predikat yang diraih dalam audit keuangan BPK dimana Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tanpa paragraf penjelasan (WTP murni).

sipatif.

Pada kesempatan tersebut Kepala BMKG Sri Woro B. Harijono menyampaikan penghargaan atas apresiasi yang diberikan Komisi V DPR, dan predikat ini tentunya menjadi pendorong kuat untuk jajaran BMKG meningkatkan kinerjanya.

Sri Woro menambahkan, dari hasil audit keuangan BPK terhadap BMKG pada tiga tahun berturut-turut (2007, 2008, 2009) mendapat predikat WTP dengan catatan. Baru tahun 2010 ini BMKG mendapat predikat WTP (murni). "Saya berharap predikat ini berlanjut ditahun-tahun mendatang," katanya.

Tahun 2010, BMKG mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 947.279,3 milyar. Realisasi anggaran mencapai 93,4% dengan rincian belanja pegawai 92,44%, belanja barang 91,52%, dan belanja modal 95,61%.

Menanggapi tentang kabut asap yang sering terjadi di Kalimantan, Sri Woro berjanji akan melakukan antisipasi. Dia juga sependapat perlunya dilakukan langkah antisipasi, karena selain membahayakan bagi kesehatan

masyarakat, juga dapat membahayakan bagi penerbangan.

Sementara Sekretaris Bapel BPLS Adi Sarwoko mengatakan, terhadap laporan keuangan BPLS tahun 2010 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan.

Penjelasan di sini dalam arti, terdapat realisasi belanja modal untuk membiayai kegiatan pengaliran lumpur pada Kali Porong, yang tidak menghasilkan aset tetap. Pengeluaran belanja modal tersebut tercatat di akun Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp 49.148.926.593,-. Atas penyajian ini, BPK menganggap perlu untuk dilakukan penghapusan atas aset konstruksi dalam pengerjaan sebesar tersebut di atas.

Langkah yang dilakukan Bapel BPLS, berkonsultasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan Dirjen Kekayaan Negara, untuk memperoleh masukan tindak lanjut yang harus dilakukan Bapel-BPLS, terkait adanya belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. (tt) foto:ry/parle



Jajaran BMKG

DPR Desak Pemerintah Tuntaskan Pembayaran Eks Karyawan PT DI

DPR mendesak Pemerintah segera menuntaskan pembayaran hak eks karyawan PT Dirgantara Indonesia (DI) sebesar Rp. 170 Miliar.



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (paling kanan) berdialog dengan eks karyawan PT. DI di ruang pansas D, Nusantara II DPR



Saat demonstrasi eks karyawan PT. DI untuk menuntut penyelesaian pembayaran tunggakan gaji mereka

“Tidak perlu persoalan ini sampai ke Presiden, cukup tingkat Menteri saja bisa selesai persoalan ini,” jelas Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, di Ruang Pansas D, Nusantara II, Selasa, (12/7).

Dia mengatakan, seluruh pimpinan DPR dan komisi IX DPR akan membuat surat kepada Meneg BUMN agar segera menyelesaikan tunggakan gaji

eks karyawan PT DI.

“Kita tinggal menunggu political will Meneg BUMN dan Menteri Keuangan agar segera membayar hak karyawan tersebut,” jelasnya.

Menurutnya, pimpinan komisi IX DPR juga telah mengirimkan surat ke Bangar agar memasukkan anggaran untuk PT DI untuk tahun anggaran 2011.

“Sebelumnya pada tanggal 8 february 2011 saat RDP Komisi IX DPR juga menegaskan dalam kesimpulannya bahwa Komisi IX DPR mendukung anggaran untuk PT DI,” paparnya.

Sementara Irgan Chairul Mahfiz (F-PPP) mengatakan, terdapat dua solusi menuntaskan persoalan ini pertama Pimpinan DPR menyurati Meneg BUMN agar segera menyelesaikan hak eks-karyawan yang belum dibayar.

Kemudian, mendorong eks karyawan untuk mendapatkan pemodalan sehingga mereka dapat kembali bekerja. “Karena suasana masih membahas APBNP ini dapat dipertajam dengan mencari solusi diantaranya membayarkan sisa hak karyawan sebesar Rp 170 miliar atau dalam bentuk pemodalan,” jelasnya.

Pengurus Serikat Pekerja PT DI Mardiyono mengatakan, pada tahun 2003, pekerja dirumahkan dengan cara unprosudural, kemudian serikat pekerja melakukan perlawanan hukum hingga pada tanggal 31 desember 2003 jatuh putusan PHK.

“Pada saat itu sebagian mengambil PHK karena keterpaksaan dan pembayaran tidak sesuai artinya masih memiliki kekurangan yang signifikan sehingga kami melakukan perlawanan hukum kembali,” paparnya.

Empat tahun kemudian, lanjutnya, pada bulan September 2007 kami melakukan upaya hukum memailitkan PT DI dengan cara itu maka PT DI memiliki kewajiban segera membayarkan hak karyawan yang belum terbayar.

“PN Niaga Jakpus mengabulkan permohonan kami, selanjutnya pada 17 September 2007 dilakukan mediasi dengan Mantan Wapres Jusuf Kalla dengan disepakati adanya perjanjian perdamaian. Yang intinya PT DI sepatkat membayarkan hak karyawan sebesar Rp 170 miliar sisanya untuk 3431 orang dibawah SP forum komunikasi karyawan PT DI,” paparnya. (si) foto: as/parle

H. Refrizal

Media Perlu Berimbang dalam Memberitakan DPR

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI H. Refrizal mengatakan, media elektronik seperti televisi dan media cetak lainnya selama ini hanya meliput kegiatan yang menurut mereka news saja, padahal rapat di DPR terkadang sampai dini hari. “Jika kurang menarik dan tak ada nilai jual beritanya maka mereka tidak akan meliput kegiatan kita” tukas Refrizal.

Hal tersebut dikatakan Refrizal selaku ketua Tim BURT dalam sambutannya pada pertemuan Sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) DPR RI Tahun 2010-2014 di Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat (6/7). Kepada para media, Refrizal meminta agar membuat berita yang berimbang tentang DPR, tidak hanya yang negatif saja.

Turut serta pada kunjungan ke Kalimantan Barat kali ini 12 anggota BURT yaitu : Asfihani, Lucy Kurniasari, Rinto Subekti dan Usmawarnie Peter dari Fraksi Demokrat, Hj. Oelfah A. Syahrullah Harmanto, Hetifah dan Hj. Hernani Hurustiati dari Fraksi Golkar, Mangara M. Siahaan, Sudin, dan Karoline Margaret Natasa dari Fraksi PDI Perjuangan, M. Ichlas El-Qudsi dari Fraksi PAN serta Abdul Hakim dari Fraksi PKS.

Ketua Tim Sosialisasi Renstra DPR H. Refrizal memaparkan, Renstra memuat visi dan misi yang akan dicapai lembaga DPR, serta 7 agenda prioritas untuk penguatan kelembagaan. Salah satu di antaranya mengenai penguatan kehumasan. Refrizal menilai kehumasan di DPR RI masih lemah. “Humas belum mampu meng-cover secara keseluruhan segala kegiatan DPR,” ujarnya. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai rencana lima tahunan DPR termasuk agenda prioritas yang akan dicapai. Refrizal menambahkan, sosialisasi diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan dan kegiatan DPR RI, guna menghindari kesalahpahaman dari masyarakat, sekaligus menghimpun aspirasi dan masukan bagi perbaikan Renstra ke



Wakil Ketua BURT Refrizal (batik merah) saat menyerahkan cinderamata kepada Pimpinan Universitas Tanjungpura, usai sosialisasi RENSTRA 2010-2014 masa pemilu,” tanya Prof. Thamrin.

depan.

Rektor Univ. Tanjungpura Pontianak Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA. dalam sambutannya mengungkapkan apresiasi dan terima kasihnya atas keberadaan Renstra DPR untuk pertama kalinya. Diharapkan Renstra dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa saja yang dilakukan dan dihasilkan anggota DPR dalam periode masa jabatannya.

Prof. Thamrin menjelaskan, Renstra adalah rencana kerja jangka menengah lembaga sebagai amanat konstitusi. Bagi DPR menjadi arah bagi semua unsur yang ada di dalam lingkungan DPR. Dengan adanya Renstra diharapkan kinerja DPR akan meningkat dari sisi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta pembenahan sistem pendukung, seperti sarana, perpustakaan DPR, dan pengembangan e-parliament.

“Yang menjadi pertanyaan akankah anggota DPR yang berasal dari berbagai parpol akan selalu konsisten menjalankan Renstra, di tengah-tengah perbedaan kepentingan yang semakin tajam, terutama mendekati masa-

Terkait rumah aspirasi, Ketua Tim Sosialisasi Renstra H. Refrizal mengatakan, pembentukan rumah aspirasi banyak disalahpahami oleh masyarakat. Refrizal mengungkapkan, akan ada rumah aspirasi di setiap daerah pemilihan, sehingga diharapkan masyarakat akan lebih mudah menyampaikan aspirasi kepada anggota dewan tanpa perlu jauh-jauh datang ke Jakarta. “Selama ini DPR tidak memiliki rumah aspirasi di daerah-daerah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya,” ujar Refrizal.

Ketua Tim menambahkan, selain rumah aspirasi, DPR juga sudah mengembangkan E-Parliament yang saat ini dijalankan melalui jaringan internet, website www.dpr.go.id, website pengaduan dan layanan SMS aspirasi bagi masyarakat yang akan menyalurkan aspirasinya. Dengan dikembangkannya layanan E-Parliament diharapkan ke depan semakin memudahkan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada dewan. (ANG/TV-P)

DPR Dorong Pembentukan Konsul di Kyrgyzstan

DPR mendorong pemerintah segera membentuk Konsul di Kyrgyzstan. Melalui pembentukan Konsul, diharapkan semakin mempererat hubungan kedua negara di berbagai bidang.

Pendapat tersebut disampaikan oleh Ketua DPR Marzuki Alie saat menerima Ketua Parlemen Kyrgyzstan HE Akhmatbek Keldibekov, di Gedung Nusantara II, Rabu, (13/7).

Menurut Marzuki, saat ini pelayanan Kedutaan untuk negara Kyrgyzstan dilayani oleh kedutaan Indonesia di Uzbekistan. Sementara kedutaan Kyrgyzstan juga belum membuka perwakilan negaranya di Indonesia, masih dilayani kedutaan mereka di Malaysia.

Pada kesempatan itu, Ketua DPR Marzuki Alie dan Ketua Parlemen Kyrgyzstan bertukar pikiran tentang

kedua Negara. Ketua Parlemen Kyrgyzstan HE Akhmatbek Keldibekov menanyakan mengapa dengan beragam suku bangsa, bahasa, tetap kokoh dan menjunjung persatuan kesatuan. Marzuki Menjawab Indonesia memiliki falsafah bhineka tunggal ika artinya berbeda-beda tetapi satu jua yang merupakan keyakinan yang tidak berubah sehingga meskipun berbeda dipisahkan adat istiadat tetap bersatu dalam bingkai NKRI.

“Ini merupakan satu keyakinan kita yang tidak boleh dirubah lagi sehingga meskipun ribuan etnis dan bahasa dipisahkan ribuan pulau dengan perbedaan itu kita menjadi negara yang kokoh, sejak dahulu rakyat Indonesia penduduknya beragama muslim hampir 90 persen muslim namun dengan empat pilar tadi kita saling menghargai satu sama lain,”papar Marzuki.

Sementara Ketua BKSAP Hidayat Nurwahid mengatakan, DPR mengundang secara resmi rombongan HE Akhmatbek Keldibekov untuk menghadiri kongres parlemen Asia yang membahas persoalan pekerja migran.

“Pada tahun lalu indonesia menjadi presiden parlemen asia. selain itu pada tanggal 28-29 september akan diadakan sidang di solo. Kami tahu bagian Kyrgyzstan merupakan bagian dari Asia ini merupakan undangan secara resmi agar hadir dalam acara tersebut,”jelasnya.

Wakil Ketua BKSAP Nurhayati Assegaf mengharapkan Parlemen Kyrgyzstan mengirim delegasi parlemen perempuannya pada sidang IPU, maupun sidang lainnya. “Berharap Ketua Parlemen menyertakan delegasi perempuan karena Parlemen Indonesia akan mengadakan conference parlemen perempuan sedunia,”paparnya.

Muhammad Nazib (F-PAN) mengatakan, masyarakat Indonesia kurang familiar dengan kyrgyzstan bahkan kesulitan membedakan negara tersebut dengan negara seperti Uzbekistan, Afghanistan. “Kita mengharapkan dengan kunjungan ini kita menjadi semakin familiar dengan Kyrgyzstan,”paparnya. (si)foto:si



Dialog peningkatan kerjasama Parlemen antara Ketua DPR Marzuki Alie dengan Ketua Parlemen Kyrgyzstan Akhmatbek Keldibekov

DPR Dukung Peningkatan Kerjasama RI - RUSIA

Kunjungan Muhibah Delegasi DPR ke Negara Federasi Rusia 3- 8 Juli 2011

DPR RI mendukung setiap upaya peningkatan kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Rusia. Demikian disampaikan Ketua DPR RI DR.H. Marzuki Alie di hadapan Ketua Duma Negara Rusia HE, Mr. Boris Vyacheslavovich Grylov, saat Courtesy Call di Okhotny Ryad 1 Moscow, Kamis (7/7) lalu.

Boris Grylov yang memiliki nama lengkap Boris Vyachheslavvovich Gryzlov, menyambut baik apa yang disampaikan oleh delegasi DPR RI. Ia menyatakan sangat senang dengan kedatangan delegasi DPR RI, “kami menghargai kedatangan delegasi dari Indonesia yang telah memenuhi undangan kami. Kami berharap kedatangan delegasi dapat lebih meningkatkan kerjasama hubungan baik antara pemerintah Rusia dengan pemerintah Indonesia. Kerjasama diberbagai bidang, seperti ekonomi, budaya, sosial harus lebih ditingkatkan” Lanjutnya.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh Boris, Marzuki yang juga didampingi oleh Dubes RI untuk Rusia, Hamid Awaluddin dalam pertemuan tersebut, menguraikan perlunya peningkatan kerjasama pada bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. “ kami melihat, masih sedikit sekali mahasiswa atau pelajar Indonesia di Rusia, begitu juga tenaga kerja, oleh karenanya kami mengharapkan agar Rusia bisa lebih sedikit proaktif memberikan kesempatan kepada putra dan putri Indonesia untuk belajar di Rusia, terang Marzuki.

Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang sangat banyak, selama ini tenaga kerja mayoritas hanya terkonsentrasi di wilayah Asia, “Rusia memiliki potensi yang sangat baik bagi tenaga kerja kita. Mudah-mudahan kedepan nanti, hubungan antara Indonesia dan Rusia juga bisa merambah ke sektor tenaga kerja dan pendidikan” katanya.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam lebih tersebut, tidak ada hal hal spesifik yang dibicarakan,



Suasana pertemuan antara delegasi DPR RI dengan Duma Negara Rusia di Moskwa

kan, inti pembicaraan tidak terlepas dari topik awal yang dikedepankan, selesai pertemuan, delegasi DPR RI di jamu makan siang dengan hidangan khas Rusia Kaviar dan Vodka.

Peningkatan Ekspor dan Impor

Sementara itu, dalam pertemuan antara delegasi DPR RI dengan Dewan Federasi Rusia, di jalan B.Dmitrova 26 Moscow, beberapa pokok persoalan yang menyangkut hubungan kedua negara dibicarakan secara hangat kekeluargaan. “Rusia adalah kawan lama” ujar Marzuki.

Persoalan mendasar dalam bidang ekonomi, serta kerjasama lainnya menjadi hal menarik yang dibicarakan selama hampir satu setengah jam

Alexander Porfirievich Torshin mengungkapkan bahwa kerjasama yang sudah terjalin erat dengan Indonesia saat ini, perlu lebih ditingkatkan, “Rusia sangat berharap adanya peningkatan kerjasama dengan Indonesia, ekspor \import harus terus dikembangkan dan ditingkatkan”, katanya.

Diakhir pertemuan, Ketua DPR RI menyerahkan kenang-kenangan kepada Dewan Federasi Rusia.

Istana Mariinskiy di St.Petersbrugh menjadi saksi bisu pertemuan delegasi Muhibah DPR RI dengan Pimpinan DPRD St.Petersbrugh, Selasa (5/7). Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, menghasilkan kesepakatan mengenai perlunya dibina hubungan yang lebih baik antara Indonesia dengan Rusia. (djt) foto: djt

Komisi IV DPR Menyoroti Penghematan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan

Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam merasa penghematan anggaran dana KKP perlu direvisi.



Komisi IV DPR saat Rapat Kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad

“Perlu adanya salinan kontrak, seperti apa biar kita lihat dan pelajari apakah menjamin aspirasi yang kita sampaikan kepada Kementerian” kata Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, saat Rapat Kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, di Gedung DPR, Selasa, (12/07)

Anggota Dewan lainnya, Wan Abu Bakar (F-PPP) mempertanyakan kun-

jungan rombongan para menteri KKP ke Riau beberapa waktu lalu, dalam rangka meninjau program. Mengingat tidak ada dari anggota Komisi IV DPR yang ikut melihat langsung sejauh mana program tersebut telah terealisasi. “Ngomong saja yang banyak, Pak,” sindirnya.

Sementara, Marzuki Daud (F-PG) mengharapkan adanya adanya koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Dae-

rah. Dia menilai pelaksanaan program pada bidang kelautan dan perikanan di daerah tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat atau Kementerian. “Pemanggilan kepala dinas provinsi untuk ikut Rapat Kerja Bersama dinilai sangat dibutuhkan, karena setiap pembangunan di daerah tidak sejalan, apa yang diusulkan pemerintah pusat atau kementerian itu tidak sesuai,” terangnya.

Sudin (F-PDIP) menyinggung data impor ikan ke Indonesia yang sampai saat ini belum ada, sehingga jelas kebutuhan kita, dan penting peningkatan daya saing pabrik ikan di Indonesia. Dia tidak menginginkan kasus impor kembali terulang, “Tukang daging bisa dapat impor ikan ijinnya, saya mau tahu mekanisme impor ikan itu bagaimana, harus jelas supaya masyarakat tahu transparan, jangan ada sembunyi-sembunyi,” tegasnya.

Selain itu, Sudin juga menyoroti masih maraknya ilegal fishing, “Ikan kita dicuri, tapi dijual ke kita lagi,” geramnya. Diambilnya bahwa ada beberapa eselon yang mengetahui hal menyangkut ijin impor ikan dan pengawasannya. Dirjen Pengawasan perlu diberikan dana yang besar untuk mengatasi hal tersebut, tetapi jika masih saja terjadi kasus serupa maka kinerjanya yang kurang baik. (ldp/uh/TimParlemenaria)/foto:iw/parle.

Fungsi Badan POM Dipertanyakan

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mempertanyakan bagaimana caranya agar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) dapat berfungsi dengan baik dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Pertanyaan ini diajukan beberapa anggota Baleg DPR saat rapat dengar pendapat umum dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan

Indonesia (Aspetri), Senin (11/7) yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Dimiyati Natakusumah.

Sore itu, Baleg DPR mengundang berbagai instansi yang terkait dengan kesehatan untuk mendapatkan masu-

kan-masukan terhadap RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia yang menjadi usul inisiatif DPR.

Anggota Baleg Achmad Rubaie mengatakan, sudah ribuan obat ber-

merek yang beredar di pasaran, juga ribuan obat tradisional yang beredar serta tak terhitung jumlahnya produk makanan yang memerlukan kerja keras dari jajaran Badan POM untuk melakukan pengawasan.

UU ini, kata Rubaie, perlu dibuat secara komprehensif sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang terkait dengan obat dan makanan. Karena itu, masukan-masukan ini sangat diharapkan untuk dapat lebih menyempurnakan Draf Rancangan Undang-Undang dimaksud.

Sementara Anggota Baleg lainnya, Jamaluddin Jafar menanyakan, jika pegawai di jajaran Badan POM dinilai kurang expert, kriteria-kriteria apa yang dapat dipakai di Badan ini untuk dapat menjadi badan pengawas yang kredibel dan memiliki pegawai yang handal di bidangnya.

Dalam memberikan masukannya, Ketua Umum IDI Prijo Sidipratomo mengatakan, salah satu permasalahan pengawasan obat dan makanan adalah keprihatinan terhadap Badan POM yang belum dapat berbuat maksimal dalam menangani berbagai permasalahan obat dan makanan.

Prijo menambahkan, IDI juga merasa prihatin banyaknya pegawai yang kurang expert di Badan POM, sehingga perlu direformasi. Menurutnya, komposisi Badan POM sekarang tidak lazim dibandingkan dengan Badan POM di luar negeri. Seharusnya, kata Prijo, posisi di Badan POM ini diisi oleh berbagai pakar yang ahli dibidangnya.

Untuk itu IDI mengusulkan, perlunya ditingkatkan kinerja Badan POM atau dilakukan revitalisasi dari Badan POM untuk dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Direformasinya Badan POM dengan menempatkan orang-orang yang expert didalamnya. Sebagai contoh, ahli Farmakologi, ahli Mikrobiologi, ahli Toksikologi, ahli Biokimia, ahli Biologi, ahli Parasitologi, ahli Virologi, Apoteker/Farmasis, ahli Kimia dan lain-lainnya, sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat dilakukan dengan optimal.

Selama ini, IDI menilai kondisi yang ada di Badan POM mayoritas diisi dari Apoteker/Farmasi.

Mengingat tugas Badan POM sa-

ngat penting dalam melindungi masyarakat, IDI mengusulkan pemilihan Pimpinan Badan POM sebaiknya dipilih dengan cara fit and proper test, sehingga lebih akuntabel. Dia juga mengusulkan, sebaiknya Pimpinan Badan POM dilakukan secara kolektif (3 orang).

Dalam kesempatan tersebut, IDI juga mengusulkan dilibatkannya Ikatan Dokter Indonesia dalam ikut mengawasi obat, makanan dan minuman

makanan.”Apabila kita mempunyai payung hukum yang sentral, masalah obat akan dapat terpecahkan,” kata Ketua IAI.

Ketua ASPETRI, Yasmin mengatakan, sebagai asosiasi yang bergerak untuk menghimpun seluruh ramuan Indonesia perlu mendapatkan payung hukum yang dapat mengayomi ramuan asli Indonesia. Dengan adanya payung hukum, obat tradisional Indonesia diharapkan dapat menjadi



Anggota Baleg Achmad Rubaie (kiri)

serta pengawasan terhadap Badan POM itu sendiri.

Hal ini ditujukan semata-mata untuk perlindungan terhadap masyarakat dan merupakan bagian dari pengawasan independen.

Sementara Ikatan Apoteker Indonesia memberikan usulan perubahan judul terhadap RUU dimaksud. IAI mengusulkan sebaiknya judul RUU tersebut adalah RUU Farmasi, alat Kesehatan dan Makanan.

Menurutnya, judul ini lebih strategis dan lebih komprehensif mengingat sudah ada 16.000 merk obat yang beredar di pasaran, ribuan merk obat tradisional dan ribuan merk

tuan rumah di negeri sendiri.

Keprihatinan yang dirasakan selama ini, banyak beredarnya obat-obat tradisional yang datang dari negara lain seperti Cina maupun Vietnam. Label obat tradisional dari luar negeri ini bahkan menggunakan bahasa negara asalnya yang tentunya dikhawatirkan tidak akan dimengerti sepenuhnya oleh masyarakat. Di sini diperlukan pengawasan serius, jika tidak obat-obat tradisional ini akan semakin merajai di negara kita.

Namun menurutnya, hal yang tak kalah pentingnya diperlukan juga sebuah UU tentang Perlindungan Tanaman Berkhasiat. (tt) foto:Ry

Indonesia Mendukung Reformasi PBB

Negara Republik Indonesia mendukung reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam hal perluasan keanggotaan Dewan Keamanan, baik keanggotaan tetap maupun keanggotaan tidak tetap.



Ketua Komisi I Mahfud Siddiq (kanan) saat berdialog Ketua Parlemen Australia Harry Jenkins

“Indonesia dalam posisi menginginkan keanggotaan di perluas baik yang tetap maupun yang tidak tetap. Karena keanggotaan PBB sekarang yang lebih menggambarkan pasca perang dingin sudah tidak relevan,”

tegas Ketua Komisi I Mahfud Siddiq setelah menerima Ketua Parlemen Australia The Hon Harry Jenkins, Rabu (13/7) di gedung DPR RI.

PBB pada saat ini perlu adanya reformasi dimana keanggotaan perlu ditinjau bukan lagi dari perspektif sosisiasi pasca perang dingin. Mahfud mengatakan terkait mengenai hak veto, apabila keanggotaan PBB diperluas tetapi Hak veto masih dipegang khusus oleh lima negara. menurutnya merupakan suatu bentuk ketidakadilan, banyak resolusi PBB tertetapi oleh lima negara ini.

Di asia tenggara, Selain australia juga ada jepang yang berkompetisi kuat mencalonkan sebagai anggota dewan keamanan PBB, dia menegaskan siapa yang mempunyai ide lebih menjanjikan dan mempunyai ide yang positif, indonesia berpeluang untuk mendukungnya.(as)foto:as

Komisi VI DPR Setujui Usulan APBN-P Kemendag Rp 400 Miliar

Komisi VI DPR menerima dan menyetujui usulan APBN-P Tahun Anggaran 2011 Kementerian Perdagangan RI sebesar Rp 400 Miliar.



Anggota Komisi VI DPR Gde Sumanjaya Linggih

“Anggaran, dan penghematannya dapat disetujui dan prioritas anggaran diarahkan untuk infrastruktur,” jelas anggota Bangor Komisi VI DPR

Gde Sumanjaya Linggih dari Fraksi Partai Golkar, saat Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, di Gedung Nusantara I, Senin,

(11/7).

Komisi VI DPR juga dapat menerima dan menyetujui anggaran dari hasil penghematan anggaran Kementerian Perdagangan RI sebesar Rp. 94 Miliar yang rincian programnya akan dibahas lebih lanjut pada rapat kerja berikutnya.

Pada kesempatan itu, Nasril bahar (F-PAN) menyoroti perlu segera dievaluasi fokus infrastruktur untuk daerah terkait program percepatan perdagangan dalam negeri. “Jangan daerah-daerah tertentu saja yang memperoleh anggarannya,” tambahnya.

Dalam kesimpulannya, Komisi VI DPR menerima dan menyetujui usulan APBN-P tahun anggaran 2011 KPPU sebesar Rp. 6 Miliar yang rinciannya akan dibahas lebih lanjut pada rapat kerja berikutnya.

Komisi VI DPR juga menerima dan menyetujui realokasi anggaran dari hasil penghematan anggaran KPPU sebesar Rp. 13 Miliar. (si)/foto:iw/parle.

Pemerintah Janji Lakukan Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara

Pemerintah berjanji akan melakukan perbaikan-perbaikan secara optimal dalam pengelolaan keuangan negara dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan RI, Agus DW Martowardojo dalam Rapat Paripurna Dewan yang dipimpin Wakil Ketua/Korekku, Anis Matta, di Gedung Nusantara II DPR, Senin (11/7).

Menurutnya, peningkatan transparansi dan akuntabilitas tersebut ditandai dengan semakin membaiknya opini audit BPK atas LKPP Tahun 2009 dan 2010, yaitu “Wajar Dengan Pengecualian” dari opini “Tidak Memberikan Pendapat” untuk LKPP Tahun 2004 – LKPP Tahun 2008. Dan semakin meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dari 7 LKKL pada tahun 2006 menjadi 53 LKKL pada tahun 2010, tambahnya.

Upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Negara tersebut diharapkan terus mendapat dukungan secara konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga kualitas LKPP dan LKKL pada waktu mendatang akan semakin baik dan memperoleh opini audit terbaik dari BPK, harapnya.

Menteri Keuangan menyadari bahwa untuk memperbaiki kualitas LKPP sebagai pertanggungjawaban keuangan Negara, berbagai upaya harus terus menerus dilakukan secara konsisten. “Langkah-langkah perbaikan ini perlu melibatkan semua unsur penyelenggara Negara baik lembaga eksekutif, legislatif, dan badan pemeriksa,” tegasnya. Perbaikan ini hanya dapat terwujud bila semua pihak ikut meningkatkan pemahaman dan kompetensinya di bidang pengelolaan dan pelaporan keuangan Negara sesuai



dengan prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang disepakati, tambahnya.

“Dengan demikian, cita-cita Indonesia untuk mengelola keuangan Negara dengan prinsip-prinsip tata kelola yang bersih dan baik dapat kita capai bersama,” paparnya. Hal ini akan menjamin keuangan Negara akan menjadi instrument yang sangat penting bagi perbaikan kesejahteraan rakyat Indonesia, kata Agus seraya menambahkan sesuai dengan amanat konstitusi.

Menteri Keuangan berharap agar tanggapan pemerintah ini dan berbagai substansi yang tertuang dalam

RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2010 dapat dipelajari secara detail dan komprehensif oleh fraksi-fraksi DPR. Pemerintah tidak sekadar menjanjikan mengenai penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan Negara. Namun, lanjutnya, pemerintah telah membuktikan dengan upaya nyata secara sistematis, konsisten, dan terus menerus dengan berbagai upaya yang diwujudkan dalam berbagai keputusan, tindakan, dan hasil yang terus membaik, termasuk kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN melalui LKPP.(iw) /foto:iw/parle.

Sidang APA Fokus Soroti Pekerja Migran

Permasalahan mengenai pekerja migran menjadi penting bagi negara-negara di Asia, mengingat beberapa negara di Asia menjadi negara pengirim dan negara penerima tenaga kerja migran.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua/Korpolkam, Priyo Budi Santoso pada Luncheon Talk dalam rangka menyambut APA International Conference on the Principles of Friendship and Cooperation in Asia, di Asean Room - Hotel Sultan, Selasa (12/7)

“Tentunya keadaan ini memiliki keuntungan masing-masing, baik bagi negara pengirim dan negara penerima. Negara pengirim dapat menawarkan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya sekaligus menjadikannya sebagai sumber devisa, sementara negara penerima dapat memenuhi kebutuhan mereka terhadap ketersediaan tenaga kerja,” jelasnya.

Namun, lanjutnya, tenaga kerja migran ini juga menimbulkan tantangan tersendiri diantaranya perlindungan keselamatan kerja dan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial mereka.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja, tantangan tersebut adalah prioritas masalah yang harus segera ditangani. Oleh karenanya, jelas Priyo, Indonesia meyakini bahwa kesempatan untuk menjadi tuan rumah dalam pembahasan tingkat internasional mengenai pekerja migran ini merupakan momentum yang perlu digunakan sebaik-baiknya untuk menghasilkan kerangka kerjasama regional bagi solusi komprehensif atas permasalahan tenaga kerja migran.

Dia menambahkan, bagi negara-negara Asia, prinsip persahabatan dan kerjasama berjalan didasarkan pada adanya ikatan sejarah, geografi, budaya dan peradaban yang telah mengakar sejak dahulu kala.

Selain itu, tegas Priyo, masyarakat Asia memiliki persamaan tantangan

dan kesempatan dalam dunia internasional sehingga timbul keinginan untuk menciptakan kerjasama dan kolaborasi lebih jauh. Terlebih lagi, globalisasi disatu sisi menimbulkan persaingan antar kawasan, namun di sisi lain juga menimbulkan ketergantungan antar negara, tambahnya.

Oleh karena itu, APA berkeyakinan bahwa struktur kerjasama yang lebih kokoh dan efektif diantara masing-masing negara di Asia diperlukan guna membuat pembangunan kawasan di Asia lebih maju dan komitmen negara-

negara Asia terhadap perdamaian dan keamanan di kawasan lebih meningkat, tutur Priyo.

Priyo berharap dengan adanya prinsip-prinsip friendship and cooperation in Asia akan dapat mempromosikan solidaritas, persahabatan dan hubungan bertetangga yang baik diantara negara-negara Asia sehingga Negara anggota APA dapat maju bersama dan hidup dalam kawasan yang lebih damai dan stabil. “Mudah-mudahan parlemen negara-negara APA beserta observer dapat hadir dalam acara Asian Parliamentary Assembly Ad Hoc Committee Meeting on the Protection on Migrant Workers and Conference on the Principles of friendship and cooperation in Asia, di kota Solo, Jawa Tengah, tanggal 28-29 September 2011,” ujarnya.(iw)/foto:iw/parle.



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso

DPR RI Terima Ketua Parlemen Kyrgyzstan

Ketua BKSAP Hidayat Nurwahid menerima kunjungan resmi rombongan Ketua Parlemen Kyrgyzstan HE Akhmatbek Keldibekov di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa malam, (12/7),

“Ini merupakan tamu DPR dan kita seringkali menerima berbagai negara sahabat karena memang dalam era demokrasi kita dapat saling berkunjung dan tukar informasi antar parlemen,” jelasnya sebelum kedatangan rombongan Parlemen Kyrgyzstan.

Melalui kunjungan ini, lanjut Hidayat, diharapkan dapat menjembatani hubungan antar kedua negara serta menyelesaikan persoalan yang menghambat di tingkat pemerintah.

“Ini kunjungan bersejahtera kyrgyzstan karena baru pertama kali mengunjungi Indonesia, ada banyak hal yang bisa dibicarakan antar kedua parlemen,” paparnya.

Dia mengatakan, Kyrgyzstan merupakan negara parlemen OKI. Karena itu, pada kesempatan tersebut Indonesia akan mengingatkan parlemen Kyrgyzstan agar terlibat aktif dalam



Ketua BKSAP Hidayat Nurwahid

sidang-sidang parlemen OKI dimasa mendatang.

Direncanakan Rombongan Parlemen Kyrgyzstan yang berjumlah sekitar 35 orang akan mengadakan kunjung-

ngan selama dua malam. Direncanakan rombongan akan menemui Ketua DPR Marzuki Alie, Wapres Boediono, dan Menlu RI Marty Natalegawa. (si)/foto: iw

DPR RI Tandatangani MOU dengan Parlemen Kyrzygstan

DPR RI dan Parlemen Kyrzygstan telah menandatangani Mutual of Understanding (MOU) yang berisi kesepakatan bersama meningkatkan kerjasama di berbagai bidang.

“Kedatangan parlemen Kyrzygstan bertujuan untuk meningkatkan hubungan kedua parlemen,” jelas Ketua DPR Marzuki Alie saat konferensi Pers, di Gedung Nusantara III, Rabu, (13/7).

Menurut Marzuki, MOU yang ditandatangani merupakan modal dasar dalam rangka peningkatan kerjasama pada tingkat parlemen, Fraksi, maupun antar Komisi kedua negara.

Selain itu, meskipun sudah terjalin hubungan informal Indonesia dan Kyrzygstan selama lebih dari 15 tahun pada bidang perdagangan, investasi, pariwisata namun masih belum sesuai seperti yang kita harapkan. “Oleh karenanya perlu ditingkatkan pada tingkat hubungan antar parlemen, Karena menurut informasi sudah banyak warga negara Kyrzygstan sudah mengunjungi Bali namun belum ada hubungan formal antar kedua negara,” paparnya. Dalam MOU tersebut, tambahnya,



Penandatanganan Kesepakatan MOU antara DPR RI dengan Parlemen Kyrzygstan

juga mengatur pertukaran pengalaman antar kedua parlemen.

Sementara Ketua Parlemen Kyrzygstan HE Akhmatbek Keldibekov mengatakan, MOU ini merupakan bukti keseriusan parlemen Kyrzygstan dan kita semua mengharapkan dorongan

agar eksekutif juga memberikan dukungan aktifnya untuk kemajuan kedua negara. “Kita mengharapkan ini tidak hanya diatas kertas semata tetapi real menunjukkan bahwa kita telah bekerja,” tambahnya. (si)/foto: iw/parle.



Kunjungan Muhibah Ketua DPR-RI Marzuki Alie ke Negara Federasi Rusia antara lain bertemu dengan Ketua Duma Rusia Boris Vyacheslavovich (foto kiri) dan Ketua DPRD St. Petersburg VS. Yagya (foto kanan). 3 - 8 Juli 2011. foto:DJ



Kunjungan Delegasi Parlemen Kyrgyzstan yang di Pimpin oleh Akhmatbek Keldibekov diterima Ketua DPR Marzuki Alie dan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR-RI di GedungNusantara III. 14 Juli 2011 foto:AS



Pelantikan Anggota DPR Pengganti Antar Waktu dari Fraksi partai Demokrat, K.H. Yunus Roichan, SH, M.HI menggantikan C.P. Sangadji Masaid, SE di Operation Room, Gedung Nusantara 13 Juli 2011. foto:RY

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344 dan Layanan Informasi Publik di www.ppid.dpr.go.id / www.pengaduan.dpr.go.id